

Al-Risalah

Jurnal Ilmu Syariah dan Hukum

Penanggung Jawab

Muhammad Hasbi Umar

Penyunting Ahli

A. Husein Ritonga (IAIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi)

M. Amin Suma (UIN Syarif Hidayatullah Jakarta)

Mohd Roslan bin Mohd Nor (University of Malaya, Malaysia)

Jhoni Najwan (Universitas Jambi)

Bahrul Ulum (IAIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi)

Subhan (IAIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi)

Erdianto Effendi (Universitas Riau)

Penyunting Pelaksana

Sayuti (Ketua)

Zulqarnain (Anggota)

M. Zaki (Anggota)

Editor Bahasa Inggris: Agus Salim

Editor Bahasa Arab: Hermanto Harun

Tata Usaha

Choiriyah

Siti Asnaniyah

M. Fathurrahman

Alamat Redaksi:

Fakultas Syariah IAIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi

Jl. Jambi-Muarabulian KM. 16 Simp. Sungaiduren, Muarojambi-Jambi

Telp/Fax. (0741) 582021, e-mail: jurnal.alrisalah@gmail.com

Al-Risalah adalah jurnal ilmu syariah dan hukum (JISH) yang terbit dua kali setahun. Diterbitkan oleh Fakultas Syariah IAIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi sejak 2001. Kehadiran JISH ini diharapkan sebagai ruang pemikiran kritis dan terbuka bagi semua kalangan (akademisi, intelektual, aktivis, dan mahasiswa) yang konsen terhadap perkembangan ilmu syariah dan ilmu hukum.

DAFTAR ISI

Iiz Izmuddin

Hukum Islam, Pluralisme, dan Realitas Sosial 213

Bahrul Ma'ani

Urgensi Masalah dalam Upaya Tajdid Hukum Islam di Indonesia 229

M. Lohot Hasibuan

Perbankan dalam Dimensi Konvensional dan Syariah 242

Bagio Kadaryanto

Konsep Rechtsstaat dalam Negara Hukum Indonesia (Kajian terhadap Pendapat M.T. Azhari) 266

M. Hasbi Umar

Hukum Menjual Hak Suara pada Pemilu pada dalam Perspektif Fiqh Siyasi Sunni 288

Sayuti

Tolok Ukur dan Upaya Hukum terhadap Pembatalan Peraturan Daerah 314

Shamsiah Mohamad

Penetapan Hukum dalam Hukum Islam (Analisis Metodologi Pengambilan Hukum dalam Fatwa DSN-MUI No. 40/DSN-MUI/X/2003) 337

Mohd Quzaid al Fitry B. Termiji

Studi Komparatif tentang Kedudukan Hakim Wanita di Mahkamah Syariah dan Mahkamah Sipil Malaysia 363

Ramlah

Implikasi Pengaruh Politik Hukum Kolonial Belanda terhadap Badan Peradilan Agama di Indonesia 383

Hadenan bin Towpek

Konsep Mudarabah Menurut Syekh Daud al-Fatani 403

PENETAPAN HUKUM DALAM HUKUM ISLAM (ANALISIS METODOLOGI PENGAMBILAN HUKUM DALAM FATWA DSN-MUI NO. 40/DSN-MUI/X/2003)

Shamsiah Mchamad

Professor Madya Bidang Ushul Fiqh, Akademi Pengajian Islam,
Universiti Malaya, 50603 Kuala Lumpur, Malaysia

Abstract: *As is known, Islamic principles so broad and flexible, including in support of a wide range of investment and economic activity that will be a positive impact on the economic life of the justice community, both as an investor and pengelolah. Therefore, stakeholders concerning the economic life have made the rules to avoid the risk of misuse of Islamic law. One of them, Fatwa DSN-MUI No. 40/DSN-MUI/X/2003 on Capital Markets and General Guidelines for the Application of Sharia Capital Market. However, as an academic study, the authors want to analyze on what the law-making methodology used in the Fatwa DSN-MUI. And after analysis, it can be concluded that the determination of the Fatwa DSN-MUI uses a combination of three methods: bayani, qiyasi and taqriri.*

Keywords: *Islamic law, Fatwa DSN-MUI, law-making methodology.*

Abstrak: *Seperti diketahui, prinsip syariah begitu luas dan fleksibel, termasuk dalam mendukung berbagai kegiatan investasi dan ekonomi yang akan memberikan dampak positif bagi kehidupan ekonomi ummat yang berkeadilan, baik sebagai investor maupun pengelolah. Oleh karena itu, pihak yang berkepentingan terhadap kehidupan ekonomi tersebut telah membuat aturan-aturan untuk menghindari risiko penyalahgunaan Hukum Islam. Salah satunya, Fatwa DSN-MUI No. 40/DSN-MUI/X/2003 tentang Pasar Modal dan Pedoman Umum Penerapan Prinsip Syariah Bidang Pasar Modal. Namun, sebagai suatu kajian akademis, penulis ingin menganalisis tentang metodologi pengambilan hukum apa yang digunakan dalam Fatwa DSN-MUI tersebut. Dan setelah dianalisis, dapat disimpulkan bahwa penetapan Fatwa DSN-MUI tersebut menggunakan gabungan tiga metode,*

yaitu: bayani, qiyasi dan taqriri.

Kata Kunci: hukum Islam, Fatwa DSN-MUI, metodologi pengambilan hukum.

Pendahuluan

Ekonomi Islam mengenal adanya lima prinsip yang disepakati oleh ulama untuk menjalankan aktivitas perekonomian, yaitu tauhid, khilafah, 'adalah, ta'awun dan maslahah.¹ Sedangkan dalam syariah ada beberapa prinsip syariah yang digunakan dalam penentuan hukum, diantaranya prinsip "memastikan keadilan", "tiada kesempitan" dan prinsip "memelihara kemaslahatan dunia".²

Implikasi dari prinsip syariah ini mendukung berbagai kegiatan investasi dan ekonomi yang akan memberikan dampak positif pada ekonomi yang nyata berdasarkan keadilan sebagai investor dan pengelolanya. Karena itu, pihak yang berkepentingan ke atas ekonomi Islam tersebut membuat suatu aturan yang bersifat Fatwa untuk menghindari risiko penyalahgunaan dari Hukum Islam. Salah satu aturan itu ialah Fatwa DSN-MUI No. 40/DSN-MUI/X/2003 tentang Pasar Modal dan Pedoman Umum Penerapan Prinsip Syariah Bidang Pasar Modal.

- 1 Nur Ahmad Fadhil Lubis, "Financial Activitism Among Indonesian Muslims", dalam Virginia Hooker & Amin Saikal et al, *Islamic Perspectives on The New Millennium*, (Singapore: ISEAS Publication, 2004), hlm. 97.
- 2 Mengikuti Muhammad 'Abd Razzaq Manna, beliau menterjemah perkataan *principle* sebagai *mabda'*(prinsip), *asl* (asal), *masdar* (sumber), *mansha'* (punca), *qanun* (undang-undang) dan *asas*. Muhammad 'Abd Razzaq Manna, *ad-Dalail: English-Arabic Dictionary*, Cet. Ke-2, (Al-Qaherah: Maktabah al-Mutanabbi, 1984), hlm. 596. Oleh karena itu, menurut Ahmad Shalabi, syariah mempunyai dua prinsip hukum yang penting yaitu "tiada kesempitan" (عدم الحرج) sesuai dengan firman Allah swt dalam Al-Hajj (22): 78, Al-Baqarah (2): 185, An-Nisa' (4): 28, dan Al-Ma'idah (5): 6, dan "berangsur-angsur dalam pensyariaan hukum" (التدرج في التشريع). Ahmad Shalabi, *Tarikh al-Tashri' al-Islami*, Cet. Ke-2, (Al-Qaherah: Maktabah al-Nahdah al-'Al-Misriyyah, 1981), hlm. 128-130). Manakalah menurut al-Khudari Bek, prinsip umum syariah ada tiga iaitu ditambah dengan prinsip mengurangkan beban *taklif* (تقليل التكاليف) sesuai kaedah *لا تكليف إلا بما يطاق* (tiada *taklif* kecuali dalam perkara yang mampu dilakukan). Muhammad al-Khudari, *Tarikh al-Tashri' al-Islami*, Cet. Ke-2, (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1994), hlm. 13-16.

Gambaran Umum Fatwa DSN-MUI No. 40/DSN-MUI/X/2003

DSN adalah salah satu institusi yang didirikan oleh MUI pada Tahun 1998 berdasarkan SK Dewan Pimpinan MUI No. Kep-754/MUI/II/1999 tanggal 10 Februari 1999.³ Pendirian ini tidak dilakukan secara tiba-tiba, melainkan setelah melalui proses dan beberapa aktivitas yang akhirnya sampai pada pendirian DSN, antaranya ialah dimulai dengan perbincangan dalam acara loka karya pada Tahun 1990 yang membahas tentang bunga bank dan pengembangan ekonomi rakyat, dengan hasil dari lokakarya tersebut dirumuskan sebuah rekomendasi kepada pemerintah Indonesia agar memfasilitas pendirian bank berdasarkan prinsip syariah.⁴ Kemudian Majelis Ulama Indonesia (MUI) melaksanakan seminar ulama tentang reksa dana syariah pada 29-30 Juli 1997 di Jakarta yang telah berhasil merekomendasikan pendirian DSN. Kemudian rekomendasi ini diteruskan dengan membentuk Tim pendirian DSN pada 14 Oktober 1997, yang kemudian cadangan ini adalah satu tindakan lanjut sehingga Tahun 1998 resmi didirikan DSN dengan dasar pendirian SK Dewan Pimpinan MUI No: Kep-754/MUI/II/1999, tanggal 10 Februari 1999.

Pembentukan institusi DSN ini sangat diperlukan untuk mengawasi dan mengarahkan institusi-institusi keuangan syariah, mengingat lajunya pertumbuhan ekonomi syariah dan meluasnya sampai ke seluruh segi ekonomi. Di samping itu, juga merupakan langkah efisien dan satu koordinasi para ulama dalam menjawab isu-isu yang berhubungan dengan persoalan ekonomi/keuangan. Karena DSN mempunyai fungsi melaksanakan tugas-tugas MUI dalam menangani masalah-masalah yang berhubungan dengan aktivitas LKS, maka DSN diharapkan boleh berfungsi untuk mendorong pelaksanaan ajaran Islam dalam kehidupan ekonomi.

Kedudukan dan legitimasi keputusan DSN-MUI ini dalam mengatur ketentuan aspek syariah pada lembaga keuangan syariah dipayungi dan diakui oleh Peraturan Perundangan yang berlaku di Indonesia, antaranya: Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia No. 32/34/1999, di mana dalam Pasal 31 menyatakan: “untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan usahanya, bank umum syariah diwajibkan untuk memperhatikan Fatwa DSN-MUI”.

3 Hasanudin, “Produk dan Transformasi Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI”, *Jurnal al-Risalah*, Vol. 8, No.2, Desember 2008, hlm. 143.

4 Lokakarya dan pertemuan ulama dengan tema “Bunga Bank dan Pengembangan Ekonomi Rakyat” bertempat di Bogor pada tanggal 19-22 Agustus 1990.

Fatwa yang berkaitan dengan Pasar Modal Islam yang telah ditetapkan oleh DSN-MUI dari Tahun 2000 hingga Tahun 2008 ada sekitar sembilan Fatwa yang dapat dikelompokkan kepada dua bagian yaitu Fatwa yang berkaitan dengan pedoman umum penerapan prinsip syariah dan pelaksanaan investasi dan keputusan mengenai produk pasar modal Islam itu sendiri. Dalam kajian ini akan dibahas yang berkaitan dengan pedoman penerapan prinsip syariah.

Fatwa yang berkaitan dengan Pasar Modal Islam khususnya Fatwa tentang pedoman umum penerapan prinsip syariah dan pelaksanaan investasi akan dirujuk terhadap Fatwa tentang Pasar Modal dan Pedoman Umum Penerapan Prinsip Syariah Bidang Pasar Modal (Keputusan No. 40/DSN-MUI/X/2003). Ini dikarenakan, Fatwa tersebut merupakan Fatwa paling awal daripada Fatwa yang berkaitan dengan pasar modal Islam dan juga merupakan Fatwa rujukan bagi penerapan prinsip syariah pada pasar modal Islam. Di mana Fatwa DSN-MUI No: 40/DSN-MUI/X/2003 tentang Pasar Modal Islam dan Pedoman Umum Penerapan Prinsip Syariah Bidang Pasar Modal ini, ditetapkan pada tanggal 04 Oktober 2003 dalam rapat pleno DSN-MUI yang mengarahkan tujuannya kepada kebolehan pasar modal Islam berlangsung apabila sesuai dengan prinsip syariah.

Analisis Metodologi Pengambilan Hukum

Dalam landasan hukum pertama, yaitu ayat al-Qur'an, didapatkan ayat yang menjelaskan tentang halalnya jual beli dan haramnya riba,⁵ tidak boleh memakan harta secara batil dan menunaikan urusan niaga dengan asas suka sama suka,⁶ dan perintah agar mendapat keuntungan daripada Allah Swt dalam urusan niaga, dan penuhi janji-janji ketika melakukan urusan niaga;⁷ kedua, hadith-hadith Nabi Saw tentang jual beli. Akan tetapi tidak dijelaskan titik fokus hujahnya (wajh al-dilalah) daripada ayat al-Qur'an dan hadith-hadith tersebut. Sehingga tampak berkesan ayat al-Qur'an dan hadith-hadith yang digunakan sebagai dasar keputusan tersebut hanya sebagai landasan teoretikal yang dijangka boleh difahami oleh setiap pembaca dan penerima keputusan. Lafaz dalam ayat al-Qur'an dan

5 Al-Baqarah [2]: 275, 278 dan 279.

6 An-Nisa' [4]: 29.

7 Al-Ma'idah [5]: 1.

8 Ada sepuluh hadith tentang jual beli yang disebutkan sebagai landasan keputusan. Hadits tersebut sebagaimana telah ditulis dalam Bab III.

hadith-hadith dengan tegas (sarih al-lafz) menyebutkan hukum jual beli dan melarang memakan harta orang lain dengan cara bathil.

Berkaitan dengan landasan ini juga, didapati bahwa penempatan ayat al-Qur'an sebagai landasan hukum diletakkan secara terbalik, maksudnya menempatkan hukum haramnya riba secara final terlebih dahulu.⁹ Setelah itu baru menyebutkan ayat tentang peringkat kebolehan perniagaan¹⁰ dan keharusan mencari rezeki,¹¹ kemudian diakhiri dengan perintah penyempurnaan proses perniagaan.¹² Seharusnya diletakkan lebih dahulu landasan hukum tentang perintah keharusan mencari rezeki, kemudian disebutkan tentang bahagian dalam mencari rezeki itu dengan jalan perdagangan yang tidak memakan hak orang lain dengan jalan yang salah dan riba, barulah diletakkan landasan hukum penyempurnaan proses perniagaan.

Sedangkan penggunaan metode bayani dalam landasan hukum di atas, ditemukan dalam QS. al-Baqarah ayat 275,278-279 yang menyatakan bahawa Allah Swt mengharamkan riba dan membolehkan jual-beli tersebut, dapat dilihat dari petunjuk lafaz ke atas makna dari sudut jelas atau tidak lafaz (*bi i'tibar dalalah al-lafz 'ala al-ma'na bihasab zuhurih wa kaffih*) adalah zahi dan nas. Sebab ayat itu menyebutkan secara jelas (zahir) bahawa hukum riba adalah haram dan hukum jual beli adalah halal. Sedangkan penjelasan tentang perbezaan antara riba dan jual beli untuk menjawab perkataan orang yahudi yang menyatakan bahawa jual beli sama dengan riba adalah nas. Ini boleh dilihat dari lafaz al-bay' yang merupakan isim mufrad (kata tunggal) yang dimasuki huruf alif dan lam (baca: al adalah lafaz 'am yang menunjukkan arti umum). Maka makna al-bay' pada ayat ini adalah kepada seluruh model urus niaga jual beli termasuk jual beli saham, obligasi, waran syariah dan lain-lain. Kemudian pada QS. al-Nisa ayat 29, didapati lafaz nahy yang mempunyai penjelasan ialah larangan memakan harta (لَا تَكُلُوا أَمْوَالَكُمْ) yang difahami oleh DSN-MUI untuk menunjukkan haram, sebagaimana dalam kaedah:

الأصل في النهي للتحريم (pada dasarnya lafaz *nahy* menunjukkan haram). Lafaz *al-Batil* (الباطل) dalam ayat ini adalah lafaz 'am yang mencakup urus niaga *ribawi*. Bahkan menurut Imam al-Razi, urus niaga yang berdasarkan faedah sama keadaannya dengan memakan harta orang lain secara *batil*, karena salah satu

9 Al-Baqarah [2]: 275,278-279.

10 An-Nisa' [4]: 29.

11 Al-Jumu'ah [62]: 10.

12 Al-Ma'idah [5]: 1.

pihak menerima kelebihan tanpa mengeluarkan apa-apa. Hal ini tentu menimbulkan ketidakadilan di antara kedua pihak tersebut.¹³

Begitu pula halnya dalam QS. al-Jumu'ah ayat 10, tidak secara spesifik menunjukkan kepada hukum berdagang di pasar modal, tetapi secara umum ayat ini menunjukkan bahwa orang yang telah melaksanakan kewajiban ibadah mahdah berupa sembahyang Jum'at diperintahkan untuk keluar mencari reze-ki karunia Allah Swt. Perintah dalam ayat ini ada pada lafaz “فانتشروا” (bertebaranlah kamu) adalah amr (perintah) yang terjadi setelah lafaz larangan (nahy), lafaz larangannya iaitu lafaz ... وذروا البيع... (hendaklah tinggalkan daganganmu). Menurut mayoritas ulama usul al-fiqh, iaitu mazhab Syafi'i, Maliki dan Hanbali, lafaz *amr* (perintah) terjadi setelah lafaz *nahy* (larangan), maka perintah tersebut menunjukkan boleh (*ibahah*). Meskipun menurut kalangan Hanafiyyah, perintah tersebut menunjukkan wajib dan menurut al-Kamal bin al-Humam perintah tersebut kembali kepada hukum sebelumnya¹⁴. Sedangkan kata perintah (*amr*) pada ayat *aufu bil 'uqud*¹⁵ adalah kata perintah yang menunjukkan wajib selama tiada tanda (*qarinah*) yang mengalihkan kepada makna lain, sebagaimana telah dinyatakan dalam kaedah fiqh: (الأصل في الأمر للوجوب).

Sedangkan dalam landasan hukum kedua, yaitu terdapat juga sepuluh ha-dith Nabi Saw yang dijadikan dasar dalam menetapkan Fatwa tentang pedoman umum penerapan prinsip syariah di pasar modal Islam, yaitu hadith yang me-nyebutkan tentang larangan membahayakan diri sendiri dan orang lain;¹⁶ dila-rang menjual sesuatu yang tidak dimiliki;¹⁷ larangan menjual dua kali bagi suatu barang dan mengambil untung daripada sesuatu yang dirinya tidak terbahit;¹⁸ larangan mengurus niaga yang berunsur penipuan;¹⁹ larangan untuk penawaran palsu dan larangan menyorok barang;²⁰ serta larangan melakukan perdama-ian terhadap pengharaman sesuatu yang halal dan menghalalan sesuatu yang

13 Muhammad Ibn 'Umar al-Quraysh al-Razi, *al-Tafsir al-Kabir*, Jilid 1, (Kaherah: Matba'ah al-Baha'iyyah al-Misriyyah, 1938), hlm. 459.

14 Wahbah al-Zuhayli, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, Juz 1, Cet. Ke-2, (Beirut: Dar al-Fikr, 2001), hlm. 222-224.

15 Al-Ma'idah [5]: 1.

16 (لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ) (رواه ابن ماجه عن عباد بن الصامت وأحمد عن ابن العباس ومالك عن يحيى)

17 (لَا تَبِعْ مَا لَيْسَ عِنْدَكَ) (رواه الخمسة عن حكيم بن حزام)

18 (إِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ بَيْعَتَيْنِ فِي بَيْعَةٍ) (رواه أبو داود والترمذي والنسائي)

19 (نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الْغَرَرِ) (رواه البيهقي عن ابن عمر)

20 (لَا تَبِعَنَّ شَيْئًا حَتَّى تَقْبِضَهُ) (رواه البيهقي عن حكيم بن حزام) dan (إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنِ النَّجَشِ) (متفق عليه).

haram, yang intinya dalam hadis ini ialah kebolehan yang dianjurkan Nabi Saw terhadap perdamaian di antara Muslimin.²¹ Semua larangan (*nahy*) dalam hadis-hadis tersebut menggunakan beberapa bentuk ungkapan (*sighat*) adalah menunjukkan haram melakukan urusan niaga yang disebutkan dalam hadis itu. *Nahy* dalam hadis ini menunjukkan haram karena tidak ada tanda (*qarinah*) yang mengalihkan kepada arti karahah (yang dibenci Allah Swt).

Berkaitan dengan pendapat ulama yang merupakan dasar pertimbangan yang diperhatikan dalam Fatwa DSN-MUI tentang pedoman umum penerapan prinsip syariah di bidang pasar modal ini, dalam petikan pendapat ulama perseorangan tentang masalah hukum pasar modal, terdapat enam pendapat ulama yang dijadikan dasar dalam menetapkan hukum pasar modal Islam, yaitu: pertama, pendapat ulama salaf yang diambil hanyalah pendapat ulama Ibn Qudamah, yang berpendapat bahwa hukum berkongsi dalam bisnis (perniagaan) adalah boleh.²² Sedangkan kedua, pendapat ulama kontemporari yang juga dikutip dalam pendapat perseorangan, yaitu seperti Wahbah al-Zuhayli, Muhammad Yusuf Musa²³ yang menyatakan bahwa boleh hukumnya melakukan kegiatan transaksi ke atas saham karena pemilik saham adalah mitra dalam perseroan sesuai dengan saham yang dimilikinya, dan juga ada ulama perseorangan lainnya yang pendapatnya juga dijadikan dasar pertimbangan yaitu yang menyatakan bahwa hukum berkongsi dalam saham perniagaan hukumnya boleh bahkan kebolehan tersebut ke atas syarikat yang memiliki bisnis yang mubah antaranya Muhammad 'Abd al-Ghaffar al-Syarif,²⁴ Muhammad Yusuf Musa,²⁵ Muhammad Rawas Qal'ahji,²⁶ dan 'Umar bin 'Abdul 'Aziz al-Matrak.²⁷

Pendapat kelompok yang dikutip untuk menetapkan hukum pasar mod-

21 *لُصِّلِحَ جَائِزٌ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ إِلَّا صُلْحًا حَرَّمَ حَلَالًا أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا وَالْمُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ إِلَّا شَرْطًا حَرَّمَ حَلَالًا أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا* (رواه الترمذي عن عمرو بن عوف).

22 Lihat Ibnu Qudamah, *Al-Mughni*, Jilid 5, (Beirut: Dar al-Fikr, t.t), hlm. 173.

23 Wahbah al-Zuhayli, *Op. Cit.*, Juz. 3, hlm. 1841.

24 Muhammad 'Abd al-Ghaffar al-Sharif, *Buhts Fiqhiyyah Mu'ashirah*, (Beirut: Dar Ibn Hazm, 1999), hlm.78-79.

25 Lihat Muhammad Yusuf Musa, *al-Islam wa Musykilatuna al-Hadhirah*. (t.tp: Silsilah al-Tsaqafah al-Islamiyah, 1958), hlm. 58.

26 Muhammad Rawas Qal'ahji, *al-Mu'amalat al-Maliyah al-Mu'ashirah fi Dhaw'i al-Fiqh wa al-Syari'ah*, (Beirut: Dar al-Nafa'is, 1999), hlm.56.

27 'Umar bin 'Abdul 'Aziz al-Matrak, *al-Riba wa al-Mu'amalat al-Mashrafiyyah*, (Riyadh: Dar al-'Ashimah, 1417H), hlm. 369-375.

al adalah pendapat kelompok organisasi masyarakat Islam antar bangsa²⁸ dan pendapat kelompok intelektual Islam kebangsaan,²⁹ pendapat anggota mesyuarat pleno³⁰ dan peraturan perundangan di Indonesia serta beberapa nota kesepakatan (MOU).³¹ Akan tetapi dari enam pendapat ulama perseorangan tersebut di atas yang dijadikan landasan pertimbangan penetapan hukum tentang bolehnya saham dalam pasar modal Islam hanya dua pendapat yang secara tegas membolehkan hanya jual beli saham yang syariatnya sesuai dengan prinsip syariah, yaitu Ibn Qudamah dan Wahbah al-Zuhaili, yang kedua-duanya adalah ulama kontemporari yang masih hidup. Sedangkan ulama lainnya membolehkan jual beli saham juga pada syariat yang mubah.

Dari paparan di atas, menurut penulis bahwa pendapat ulama salaf sangat sedikit yang membahas masalah yang sama atau mirip dengan hukum pasar modal. Oleh sebab itu, pendapat yang banyak dikutip dalam Fatwa ini adalah pendapat ulama kontemporer secara perseorangan dan keputusan organisasi antar bangsa dan kebangsaan. Oleh karena itulah, corak ijtihad keputusan ini di samping merujuk kepada pendapat di kalangan ulama Hanabilah juga lebih menekankan kepada pendapat ulama yang terbabit secara langsung dengan permasalahan masa kini yang sukar diidentifikasi aliran mazhab fiqh-nya. Artinya, permasalahan yang baru muncul dalam masalah muamalah tidak harus terikat dengan mazhab fiqh tertentu tetapi cukup dengan mengambil nilai-nilai Islam dalam berurusan dengan niaga untuk menjawab masalah hukum masa kini.

Dalam pembahasan yang berkaitan isi perbab-nya, didapati pada bab pertama sebuah pembahasan tentang ketentuan umum yang terdiri daripada definisi

28 Keputusan Mukhtar Ke-7 Majma' Fiqh Islami tahun 1992 di Jeddah, yang hasilnya menyatakan: *بِجُوزِ بَيْعِ السَّهْمِ، أَوْ رَهْنِهِ مَعَ مَرَاةٍ مَا يَفْتَضِي بِهِ نِظَامُ الشَّرَكَةِ*. (Boleh menjual atau menjaminkan saham dengan tetap memperhatikan peraturan yang berlaku pada perseroan).

29 Keputusan rekomendasi Lokakarya 'Alim 'Ulama tentang Reksa Dana Syariah (*Islamic Mutual Fund*) pada 24-25hb Rabi'ul Awal 1417H/ 29-30 Juli 1997M; dan *Workshop* pasar modal Islam di Jakarta pada 14-15 Maret 2003M/ 11-12 Muharram 1424H.

30 Keputusan Mesyuarat Pleno DSN-MUI pada hari Sabtu 08 Sya'ban 1424H/04 Oktober 2003M.

31 Undang-Undang No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal; SK DSN-MUI No. 01 Tahun 2001 tentang Pedoman Dasar DSN; dan beberapa MoU antaranya MoU DSN-MUI dengan Bapepam Tanggal 14 Maret 2003, serta MoU DSN dengan SRO Tanggal 10 Juli 2003 tentang Kerjasama Pengembangan dan Implementasi Prinsip Syariah di Pasar Modal Indonesia.

beberapa istilah dalam pasar modal, di mana pada ketentuan umum, DSN sepenuhnya menggunakan istilah dalam bahasa ekonomi modern yang telah dinyatakan oleh Peraturan Perundangan di Indonesia. Dalam ketentuan umum ini tidak ada ruang untuk menganalisis corak ijtihad apatah lagi untuk menganalisis metode penetapan hukumnya. Ini dikarenakan, hanya berupa definisi pasar modal yang tidak ada kaitannya dengan pendapat imam mazhab fiqh. Sedangkan dalam bab dua, didapati beberapa prinsip-prinsip syariah dalam bidang pasar modal. Prinsip syariah yang dimaksudkan tidak dipaparkan secara jelas dan terperinci, tetapi hanya menetapkan ke atas sesuatu itu harus memperoleh pernyataan yang bersesuaian dengan syariah. Manakalah bab tiga dan berikutnya dalam Fatwa ini, hanya mengulas tentang pengertian dan kriteria emiten (*emiten*) atau perusahaan publik (awam) yang menerbitkan saham syariah.

Menurut kriteria dalam bab kedua dan ketiga ini, yang bertentangan dengan syariah antara lain ialah jenis usaha, produk barang, pelayanan yang diberikan dan akad serta cara pengelolaan perusahaan emiten (*emiten*) atau perusahaan public (awam) yang menerbitkan efek (*stock*) syariah tidak boleh bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah. Yaitu yang mengandung unsur *darar*, *gharar*,³² *riba*, *maysir*, *rishwah*, maksiat dan kezaliman, pedagang makanan dan minuman yang haram, harga pasar tidak patut, penyedia barang-barang ataupun pelayanan yang merusak moral dan bersifat mudarat, dan investasi pada emiten yang pada saat perdagangan tingkat (*nisbah*) hutang syarikat kepada institusi keuangan ribawi lebih dominan daripada modalnya.

Sebagaimana tersebut dalam Fatwa DSN-MUI ini, pelaksanaan perdagangan saham harus dilakukan menurut prinsip kehati-hatian serta tidak dibolehkan

32 *Gharar* pada asalnya bermaksud tidak tahu (*jahl*), penipuan (*al-khida*) atau ketidakpastian (*khatr*). Lihat Muhammad ibn Mukarram ibn Manzur, *Lisan al-'Arab*, Juz 5, (Bairut: Dar al-Fikr, 1968), hlm. 14-15. Namun pengertian *gharar* dalam konteks istilah jual-beli pula berbeza-beza menurut pengucapan para ulama' yang walaupun mempunyai maksud yang hampir sama. Seperti Al-Kasani menyebut bahawa *gharar* ialah *الخطر الذي استوى فيه طرف الوجود والعدم* yang maksudnya: "suatu ketidakpastian yang berada di tengah-tengah antara wujud atau tidak". Lihat Abu Bakr ibn Mas'ud Al-Kasani, *Bada'i al-Sana'i fi Tartib al-Shara'i*, Cet. Ke-2, Juz 6, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1986), hlm. 3053.

untuk melakukan spekulasi³³ dan manipulasi³⁴ yang di dalamnya mengandung unsur gharar, riba dan maysir. Transaksi-transaksi seperti ini meliputi: *najsy*,³⁵ yaitu melakukan penawaran palsu; *bay' al-ma'dum*, yaitu melakukan penjualan atas barang yang belum dimiliki (*short selling*); isider trading, yaitu memakai informasi orang dalam untuk memperoleh keuntungan terhadap perdagangan yang dilarang; menimbulkan informasi yang menyesatkan; *margin trading*, yaitu melakukan perdagangan dengan kemudahan pinjaman berasaskan bunga atau kewajiban penyelesaian pembelian tersebut; *ihtikar* (menyorok),³⁶ iaitu melakukan pembelian dan atau pengumpulan sesuatu (contoh saham syariah) bagi mempengaruhi perubahan harga, dengan tujuan mempengaruhi pihak lain.

Berkaitan dengan *bay' al-ma'dum*³⁷ di atas, pada dasarnya kebanyakan fuqa-

33 Spekulasi (*speculation*) pada asalnya bermaksud satu agakan atau satu tekaan terhadap sesuatu kejadian pada masa yang akan datang hasil daripada perkembangan yang sedang berlaku pada masa ini. Lihat *Kamus Dwibahasa*, Cet. Ke-6, (Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka, 1990), hlm. 1201. Lihat juga *Kamus Ekonomi*, Cet. Ke-1, (Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka, 1991), hlm. 245-246; dan *Kamus Kewangan*, Cet. Ke-1, (Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka, 1996), hlm. 162.

34 Manipulasi (*manipulation*) ialah satu usaha untuk memperlakukan sesuatu dengan begitu licik, mempergunakan sesuatu dengan cekap dan licik untuk kepentingan pembuatnya. *Ibid.*, *Kamus Dwibahasa*, hlm. 760-761.

35 Maksudnya penipuan dalam proses tawar-menawar, yaitu apabila penjual telah berpakat dengan seseorang agar memainkan harga iaitu dengan berpura-pura membuat tawaran yang lebih mahal untuk membeli sesuatu barang supaya harganya menjadi lebih tinggi tetapi hakikatnya dia tidak mahu membelinya. Lihat Muhammad Abu Bakr al-Razi, *Mukhtar al-Sihah*, Cet. Ke-1, Edisi Baru, (Beirut: al-Maktabah al-'Asriyyah, 1995), hlm. 603.

36 Lihat Muhammad ibn Mukarram Ibn Manzur, *Lisan al-'Arab*, (Baerut: Dar al-Fikr, 1968), hlm. 208. Menurut Ibn Hajar al-'Asqalani, *Ihtikar* iaitu menahan barang makanan dari dijual dan menunggu sehinggalah harganya menjadi mahal sedangkan ketika itu berlaku kekurangan barang tersebut di pasar dan orang ramai pula amat berhajat kepadanya. Lihat al-Hafiz Ibn Hajar Ahmad ibn 'Ali al-'Asqalani, *Fath al-Bari bi Sharh Sahih al-Bukhari*, Juz 4, Diedit Oleh 'Abd al-'Aziz ibn 'Abd Allah ibn Baz, (Beirut: Dar al-Fikr, 1996), hlm. 348. Jadi aktiviti *Ihtikar* ini amat dilarang oleh Islam. Nabi Saw pernah bersabda bahawa "seseorang itu tidak ber*ihtikar* melainkan dia adalah orang yang berdosa". Lihat dalam Yahya ibn Sharf al-Nawawi, *Sahih Muslim bi Syarh al-Nawawi*, Cet. Ke-2, Juz 11, (Beirut: Dar al-Khayr, 1996), hlm. 43.

37 *bay' al-ma'dum* ialah jual beli sesuatu yang tidak wujud atau dengan kata lain, barang tersebut tiada, tidak boleh diserahkan dan tidak menjadi milik penjual.

ha' mengambil pendirian bahwa jual beli dalam bentuk ini tidak sah (invalid) karena tidak menepati syarat dalam rukun jual beli disebabkan tiada al-mahl atau objek tidak wujud.³⁸ Imam Hanafi mendefinisikannya sebagai jual beli sesuatu yang tidak akan wujud atau ditakutkan tidak wujud (khatr al-ma'dum), seperti membeli anak kepada anak unta yang masih dalam kandungan ibunya (*bay' nitaj al-nitaj*). Namun dalam hal-hal tertentu *bay' al-ma'dum* dibenarkan.³⁹ Contohnya penggunaan *bay' al-istisna'* yang dibenarkan dalam mazhab Hanafi tapi tidak dipersetujui oleh jumhur 'ulama. Ia dibenarkan walaupun barangan (mahal) tidak wujud karena keperluan untuk menempah barangan amat tinggi ketika itu serta pelaksanaannya tidak menimbulkan beberapa kemudharatan dan risiko yang membahayakan.

Kemudian wujud istilah *bay' al-ma'dum* ini, tidaklah disebut dengan jelas dalam mazhab Maliki. Namun ia banyak dibahas dalam *bay' qabl al-qabd* yang mana pada pandangan mereka barang-barang makanan keperluan saja yang dimestikan melalui proses penyerahan (yaitu barang mesti wujud) semasa akad.⁴⁰ Mengikuti Imam Shafi'i, *bay' al-ma'dum* lebih dikenali sebagai *bay' al-ghayb*. Jual-beli ini berlaku dalam keadaan kedua-dua atau salah satu pihak berakad tidak tahu atau tidak nampak objek atau nilai yang ditukarkan, yang mana dengan kejahilan tersebut boleh membawa kepada *gharar*. Tidak semua golongan ini mengharamkan *bay' al-ma'dum* dengan alasan bahawa sifat, jenis dan harga barang hendaklah diketahui secara 'urf dan *sabit* penggunaan *khiyar al-ru'yah* ke atas pembeli.⁴¹ Imam Hanbali lebih banyak menumpukan definisi *bay' al-ma'dum* dalam konteks *bay' qabl al-qabd*. Pada pandangan mereka, selagi mana objek bukannya makanan, maka ia boleh diserahkan tanpa perlu kepada kewujudan barang tersebut, dengan syarat barang tersebut mempunyai spesifikasi yang jelas.⁴² Boleh pengkaji diringkaskan di sini bahwa *bay' al-ma'dum* mempunyai pengertian yang luas dan sesetengah fuqaha membenarkan beberapa bentuk jual beli

Lihat Artikel 197-201, *Majallat al-Ahkam al-'Adliyyah*, Tahun 1964; Vide Artikel 197-201, *The Civil Law of Palestine and Trans-Jordan*.

38 *Ibid*, Artikel 205

39 Abu Bakr ibn Mas'ud Al-Kasani, *Op. Cit.*, hlm. 296-297

40 Ibn Rushd, *Bidayat al-Mujtahid wa Nihayat al-Muqtasid*, Juz 2, (Beirut: Dar al-Fikr, 1995), hlm.117-119.

41 Ahmad ibn Hamzah ibn Shihab al-Din al-Ramli, *Nihayat al-Muhtaj ila Sharh al-Minhaj*, Juz 3, (Misr: Maktabah Mustafa al-Babi al-Halabi, t.t), hlm. 402.

42 Ibn Qudamah, *al-Mughni wa Sharh al-Kabir*, Juz 4, (Beirut: Dar al-Kitab al-'Arabi, 1972), hlm. 114-116.

dalam keadaan spesifikasi terhadap sifat, sukatan dan harga barang ditentukan secara jelas.

Asas yang menjadi pertimbangan hukum (*ta'lim al-hukm*) para ulama dan pengkaji Islam kontemporer dalam jual-beli bentuk ini ialah gharar yang wujud sekiranya barang tiada. Ini berdasarkan hadis Rasulullah Saw, antaranya:

مَنْ ابْتَاعَ طَعَامًا فَلَا يَبِيعُهُ حَتَّى يَسْتَوْفِيَهُ

“Siapa yang membeli sesuatu makanan maka janganlah dia menjualnya sehingga dia menerimanya dahulu”.⁴³

Di samping itu, terdapat pula Hadis Nabi Saw yang lain, yang maksudnya:

“Ja’far ibn Abi Wahshiyyah berkata: diriwayatkan dari Yusuf ibn Mahak, dari Hakim ibn Hizam katanya: Aku bertanya Rasulullah, ‘Wahai Rasulullah! Seseorang pemuda datang kepadaku dan meminta aku menjual kepadanya sesuatu (barang) yang tiada padaku. (tanyanya padaku) adakah engkau boleh membelinya di pasar dan menjualnya kepadaku?’. Rasulullah menjawab, ‘Janganlah kamu menjual sesuatu yang tidak ada padamu’”.⁴⁴

Hadis di atas sebagaimana yang menjadi tumpuan larangan jual apa yang tiada padamu لَا تَبِيعُ مَا لَيْسَ عِنْدَكَ (*la tabi ma laysa ‘indaka*) boleh membawa kepada beberapa pemahaman yaitu:⁴⁵

1. Barang yang dibeli tiada dalam hak milik penjual
2. Mungkin barang yang dilarang tersebut hanya jual-beli barang tertentu saja (*bay’ al-a’yan*) seperti makanan yang cepat rusak, bukannya jual-beli barang melalui deskripsi (*bay’ al-sifah*).
3. Barang tersebut tidak wujud pada masa tersebut dalam arti kata penjual tidak mampu menyerahkannya.

Selain itu, beberapa isu juga timbul dalam konteks hadis di atas, ini berkaitan dengan kelemahan sanadnya yaitu ia tidak diriwayatkan dalam koleksi hadis sahih Bukhari dan Muslim. Senarai periwayatan hadis juga bertambah (dalam

43 Abu Abdillah bin Ibrahim Ibnu Al-Mughirah bin Baldazabah Al-Bukhari, *Shahikh Bukhari*, Juz. 3, (Bairut: Dar al Fikr, t.t), hlm. 23.

44 Ibn Qayyim, ‘*Aun al-Ma’bud Sharh Sunan Abi Dawud*, Juz 9, (Beirut: Dar al-Fikr, ht.t), hlm. 401.

45 M. Hashim Kamali, “Islamic Commercial Law: an Analysis of Futures”, *American Journal of Islamic Social Sciences* (13:2), (Virginia: International Institute of Islamic Thought, 1996), hlm. 206-208.

koleksi lain) iaitu ‘Abd Allah ibn ‘Ismah di antara Yusuf ibn Mahak dan Hakim ibn Hizam. ‘Abd Allah ibn Ismah tidak diketahui (*la yu’raf*) oleh al-Dhahabi, malah Hakim ibn Hizam juga tidak jelas hal-ehwalnya (*majhul al-hal*). Hanya Ibn Hibban yang menyatakan perawi adalah *thiqqah*.⁴⁶

Frasa *la tabi’* (jangan kamu jual) juga boleh ditafsirkan kepada beberapa keadaan. Adakah ia bermaksud satu bentuk larangan yang bersifat penekanan (*jazm*) yang membawa arti haram atau makruh atau sekedar satu peringatan? Pengkaji usul al-fiqh lebih cenderung untuk menyatakan bahawa larangan tersebut lebih berbentuk peringatan dan petunjuk (*al-irshad*) dari Rasulullah, bukannya pengharaman sepenuhnya.⁴⁷

Jadi larangan Rasulullah dalam akad *bay’ al-ma’dum* disebabkan adanya *gharar* karena barang tidak boleh disampaikan. Setengah pandangan menyatakan *gharar* yang wujud dalam akad tersebut berpuncak dari ketidakwujudan barang semasa kontrak. Alasan ini tidak tepat karena barang juga tidak wujud dalam *bay’ al-salam* tetapi ia dibenarkan syarak. Pendapat lain pula menyatakan bahawa *gharar* wujud karena penjual tidak mampu menyerahkan barangan. Ini adalah alasan yang paling sesuai karena ketiadaan barang tidak bererti ia tidak boleh disampaikan.⁴⁸ Itulah salah satu sebab *bay’ al-salam* dibenarkan.

Intinya di sini ialah barang tidak berwujud bukannya menjadi puncak *gharar*, tetapi kemampuan menyerahkannya kemudian. Hal ini menunjukkan bahwa setiap kemudaratan perlu dihilangkan (*al-darar yuzal*)⁴⁹ dan masalah yang lebih penting (*al-maslahah al-rajiyah*) perlu diutamakan. Inilah yang menjadi konsep

46 Ibn Rushd, *Op. Cit.*, hlm. 117; Lihat juga Yusuf al-Qardawi, *Bay’ al-Murabahah li al-Amir bi al-Shira*, (Abidin: Maktabah Wahbah, 1987), hlm. 54-55.

47 Lafaz *la* membawa mesej bersifat larangan dalam dua keadaan berdasarkan kapasitinya. Kapasiti yang mengandungi maksud penegasan dikatakan haram, manakalah pada kapasiti bukan bermaksud penegasan dikatakan makruh. Apabila lafaz *la* (pada kapasiti bukan penegasan) ditambah dengan kapasiti lain seperti lafaz amaran (*wa’id*) yang mengandungi kesan buruk, maka ia menjadi kapasiti larangan tegas atau *haram*. Dalam hadith rasulullah tersebut, lafaz larangan tidak diikuti oleh sebarang lafaz amaran. Ini menandakan lafaz *la* membawa maksud makruh. Lihat ‘Abd al-Karim al-Khatib, *al-Siyasat al-Maliyyah fi al-Islam wa Sillatuha bi al-Mu’amalat al-Mu’asirah*, (Kairo: Dar al-Fikr al-‘Arabi, 1976), hlm. 176.

48 Ibn Qayyim, *I’lam al-Muwaqqi’in ‘an Rabb al-‘Alamin*, Juz 2, (Beirut: Dar al-Fikr, 1977), hlm. 9.

49 Jalal al-Din ‘Abd al-Rahman al-Suyuti, *al-Ashbah wa al-Naza’ir fi Qawa’id wa Furu’ Fiqh al-Shafi’i*, (Beirut: Dar al-Kitab al-‘Ilmiyyah, 1983), hlm. 83.

imam Hanafi dalam kas zakat, dengan mengharuskan pembayaran zakat melalui nilai *al-'ayn* yang diwajibkan zakat, bukannya dengan menyerahkan objek tersebut. Beliau memahami hadis Nabi Saw tersebut dari sudut kontekstualnya, tidak terlalu konservatif pada maksud tekstul.

Satu pekara lagi yang mengaitkan pasar modal Islam dengan bay al-ma'dum ialah jualan pendek (*short-selling*). Barang tidak wujud dalam kedua-dua bentuk jual beli ini, bermaksud barang tidak dilihat semasa akad. Berbagai-bagai andaian boleh dibuat ke atas sebab-sebab ketiadaan barang, seperti barang tidak dihantar, barang masih bukan hak milik penjual atau mungkin juga jual beli tidak melibatkan barang yang berwujud. Segala bentuk tidak berwujud ini pastinya memberikan kesan ke atas akad jual beli jika menimbulkan gharar.⁵⁰ Namun sekiranya *gharar* dapat dielakkan, adakah pengharaman perlu diteruskan walaupun ia mempunyai kepentingan ekonomi yang mendesak? Jika *short-selling* memangnya perlu untuk melindungi risiko turun naiknya harga, maka untuk mengelakkan kemudaratannya dan melaksanakan kepentingan ia harus dibenarkan dan dalam masa yang sama perlu menitik beratkan aspek undang-undang seperti standarisasi kontrak, pengawasan yang ketat terhadap aktivitas spekulasi dan dokumentasi keuangan yang lengkap dan tepat.⁵¹

Sebuah perdagangan yang mengandungi unsur *gharar* timbul adalah disebabkan oleh dua sebab utama; *pertama*, kurangnya informasi atau pengetahuan (*jahala, ignorance*) pada pihak yang melakukan kontrak. *Jahala* ini menyebabkan tidak dimilikinya *control* atau *skill* pada pihak yang melakukan perdagangan. *Kedua*, karena tidak adanya objek. Adapula yang membolehkan perdagangan dengan objek yang secara faktual belum ada, dengan syarat pihak yang melakukan perdagangan memiliki control untuk hampir boleh memastikannya di masa hadapan.⁵² Pada dasarnya *gharar* adalah bentuk transaksi yang mengandung cacat atau bahkan boleh mengakibatkan kerugian. Mungkin termasuk di dalamnya adalah setiap transaksi yang mengandung unsur ketidakpastian dan spekulasi. Namun ketidakpastian dan spekulasi bukan merupakan alasan utama mengapa

50 Samir 'Abd al-Hamid Radwan, *Aswaq al-Awraq al-Maliyyah*, (Kairo: International Institute of Islamic Thought, 1996), hlm. 322-328

51 Zainuddin Jafar, "Bay' al-Ma'dum: an Analysis", Kertas Kerja *International Conference of Islamic Capital Market '97*, (Kuala Lumpur: Suruhanjaya Sekuriti, 1997), hlm. 17

52 Ingg H. Achsien, *Pelaburan Syariah di Pasar Modal*, (Jakarta: Gramedia, 2000), hlm. 52.

sesuatu transaksi tidak sah disebabkan oleh *gharar*. Spekulasi yang dilarang dalam hukum Islam adalah transaksi yang menundai hak salah satu pihak atau para pihak yang melakukan transaksi.⁵³

Secara umum, mekanisme pasar (bursa efek/*stock exchange*) yang sepatutnya menurut syariah meliputi beberapa aspek, yaitu: Kepatuhan penawaran (penawaran yang sesuai), kepatuhan permintaan dan kepatuhan kekuatan pasar.⁵⁴ Dalam hal kepatuhan penawaran, prinsip syariah melarang sesuatu pihak untuk menjual barang (saham) yang belum dimiliki dan juga melarang gangguan pada penawaran (mengganggu jumlah efek yang beredar). Sebagai contohnya adalah dengan melakukan penyorokan barang dan praktik membeli hasil pertanian sebelum petani tersebut sampai kepasar. Dalam hal kepatutan permintaan, prinsip syariah melarang sesuatu pihak membeli atau mengajukan permintaan untuk membeli tanpa memiliki keperluan dan daya beli (permintaan palsu). Sedangkan dalam hal kepatutan kekuatan pasar, prinsip syariah menginginkan kegiatan pasar yang patut (yang bersesuaian), termasuk dalam hal likuiditas perdagangan, sehingga harga yang terbentuk dalam perdagangan di bursa efek (*stock exchange*) merefleksikan kekuatan tawar menawar pasar yang sebenarnya.⁵⁵

Para ahli *fiqh* kontemporer bersepakat bahwa haram hukumnya memperdagangkan saham di pasar modal dari perusahaan yang bergerak di bidang usaha yang haram. Misalnya, syarikat yang bergerak di bidang produksi minuman keras, perniagaan babi dan apa saja yang berkaitan dengan babi; perkhidmatan kewangan konvensional seperti bank dan ansurans; industri hiburan yang haram, seperti kasino perjudian, pelacuran, media porno dan sebagainya. Dalil yang mengharamkan jual beli saham syarikat seperti ini adalah semua dalil yang mengharamkan segala aktivitas tersebut.⁵⁶ Namun, jika saham yang diperdagangkan di pasar modal itu adalah daripada perusahaan yang bergerak di bidang usaha halal (misalnya di bidang pengangkutan, telekomunikasi, produksi

53 Ahmad Hidayat Buang, "Investment in Stock Exchange and Islamic Law", *Jurnal Syariah*, No. 2, Vol. 7, Desember 2007, hlm. 127-136

54 Iwan Pontjowinoto, "Prinsip-prinsip Syariah di Pasar Modal", www.dilibRARY.net/html, Akses 17 Februari 2004.

55 Lihat Abdullah al-Mushlih dan Shalah Ash-Shawi, *Bunga Bank Haram: Menyikapi Fatwa MUI Menuntaskan Keragaman Umat*, (Jakarta: Darul Haq, 2001), hlm. 121.

56 Yusuf Ahmad Mahmud al-Sabatin, *al-Buyu' al-Qadimah wa al-Mu'asirah wa al-Bur-sat al-Mahalliyyah wa al-Dauliyyah*, (Beirut: Dar al-Bayariq, 2002), hlm. 109.

tekstil, dan sebagainya), maka hukumnya adalah boleh secara syarak. Dalil yang menunjukkan lainnya dibolehkan adalah semua dalil yang menunjukkan bolehnya aktivitas tersebut.⁵⁷

Namun demikian, ada ahli fiqh yang tetap mengharamkan jual beli saham walaupun berasal dari perusahaan yang bidang usahanya halal. Mereka ini seperti, Taqi al-Din al-Nabhani,⁵⁸ Yusuf al-Sabatin,⁵⁹ dan 'Ali al-Salus.⁶⁰ Ketiga-tiga mereka sama-sama melihat bentuk badan usaha (PT) yang sesungguhnya tidak Islami. Jadi, sebelum melihat bidang usaha perusahaannya, seharusnya yang dilihat lebih dahulu adalah bentuk badan usahanya atau system yang di usahakan, apakah ia memenuhi syarat sebagai syarikat Islami (*shirkah Islamiyyah*) atau tidak. Sedangkan Taqi al-Din al-Nabhani menegaskan, bahwa perseroan terbatas (PT) adalah bentuk perusahaan yang batil (tidak sah), kerana bertentangan dengan hukum-hukum syirkah dalam Islam. Ini kerana dalam perseroan terbatas (*shirkah musamahah*) tidak terdapat ijab dan qabul (serah terimah kesepakatan) sebagaimana dalam akad *syirkah*. Tetapi yang ada hanyalah urus niaga sebelah pihak sahaja daripada pelabur yang memberikan modalnya dengan cara membeli saham dari syarikat atau daripada pihak lain di pasar modal, tanpa ada pembahasan atau perundingan apapun sama ada dengan pihak syarikat maupun di pihak pelabur (persero) lainnya. Tidak adanya ijab qabul dalam persyarikatan berhad ini sangatlah bahaya, seperti pasangan lelaki dan perempuan yang hanya mendaftarkan pernikahan di KUA tanpa adanya ijab dan qabul secara syar'i.⁶¹

Perdagangan investasi tersebut mengharuskan adanya ijab dan qabul sebagaimana yang dilakukan dalam perdagangan lainnya di mana salah satu diantara mereka mengajak yang lain untuk mengadakan kerjasama dalam suatu bidang perdagangan. Sehingga kesepakatan tersebut belum cukup hanya dengan melakukan investasi saja atau memberikan modal untuk perusahaan saja, tetapi harus mengandungi makna bekerjasama dalam suatu urusan.⁶² Oleh itulah, da-

57 Lihat Qarar Majma' al-Fiqh al-Islami VII di Jeddah 7-12/11/1412 bertepatan dengan 9-10/5/1992.

58 Taqi al-Din al-Nabhani, *al-Nizam al-Iqtisadi fi al-Islam*, Cet. VI, (Beirut: Dar al-Ummah, 2004), hlm. 152

59 Yusuf Ahmad Mahmud al-Sabatin, *Op. Cit.*, hlm. 109

60 Ali Ahmad al-Salus, *Mawsu'ah al-Qadaya al-Fiqhiyyah al-Mu'asirah wa al-Iqtisad al-Islami*, (Qatar: Dar al-Thaqafah, 2006), hlm. 465.

61 Taqi al-Din al-Nabhani, *Op.Cit.*, hlm. 153

62 *Ibid.*

lam Islam, dikenal dua model syarikah, yaitu *syarikat al-milk (co awnship)* dan *syirkah al-'add*.⁶³

Pendapat kedua yang mengharamkan bisnis atau perdagangan saham ini (walau bidang usahanya halal) adalah lebih kuat (*rajih*) karena lebih teliti dalam memahami fakta, khususnya berkaitan dengan bentuk badan usaha (Perseroan Terbatas). Sedangkan sandaran pendapat pertama (menghalalkan bisnis saham asalkan bidang usahanya halal) adalah *al-masalih al-mursalah*. Sebagaimana diketahui bahwa metode *al-masalih al-mursalah* adalah sumber hukum yang lemah, karena kehujjahannya tidak dilandaskan pada dalil yang qat'i.⁶⁴

Bentuk kontrak pemilik modal dalam hukum Islam boleh berupa *mudarabah* atau *musharakah*. Dalam fiqh moden, sekuriti saham dipandang sebagai penyertaan dalam *mudarabah musharakah (partnership)* yang merefleksikan pemilik perusahaan, bukan saham *partnership* pribadi. Fiqh salaf berpandangan bahwa akad *mudarabah* dan *musharakah* ditetapkan berdasarkan persetujuan investor dan perusahaan sebagai *mudarib* (pengelola) untuk suatu periode tertentu untuk tujuan menghindari *gharar*. Sedangkan saham dapat dijual bila-bila masa pada pasar sekunder tanpa memerlukan persetujuan daripada perusahaan yang memerlukan saham sehingga kedua kontrak tersebut seringkali dianggap tidak likuid (*cair*).⁶⁵

Sebagai institusi keuangan modern, pasar modal tidak terlepas daripada tindakan spekulasi. Para investor selalu memperhatikan perubahan pasar, membuat berbagai analisis dan perhitungan, serta mengambil tindakan spekulasi di dalam pembelian maupun penjualan saham. Aktiviti inilah yang membuat pasar tetap aktif. Tetapi, aktiviti ini tidak selamanya menguntungkan, terutama ketika menimbulkan depresi yang luar biasa. Oleh itulah, dalam praktik jual beli saham di pasar modal Islam sekalipun sangat sukar untuk menghindari daripada kegiatan spekulasi, terutama apabila semua perdagangan dalam pasar modal Islam didasarkan pada investasi jangka panjang. Ini adalah perdagangan tetap yang dominan dalam pasar modal Islam bukan di pasar perdana tetapi di pasar sekunder. Di pasar inilah sangat terbuka bagi setiap pihak untuk mengambil

63 Berkaitan dengan *syarikat al-'add*, ada lima jenis syarikat iaitu *syarikat al-'inan*, *syarikat mufawadah*, *syarikat al-abdan*, *syarikat al-wujuh* dan *syarikat al-mudarabah*. Lihat Imran Ahsan Khan Nyazee, *Islamic Law of Bussiness Organization Partnerships*, (Kuala Lumpur: The Other Press Sdn Bhd, 2006), hlm. 35-40

64 Yusuf Ahmad Mahmud al-Sabatin, *Op. Cit.*, hlm. 53

65 Inggi H Achsien, *Op. Cit.*, hlm. 60-61

untung dengan melakukan perdagangan jangka pendek dan di sinilah biasanya terjadi spekulasi.

Pada pasar ini, dibedakan antara *speculator* dengan pelaku bisnis daripada tingkat ketidakpastian yang dihadapinya. Untuk itu perlu dilihat dahulu karakter investasi dan speculative-nya. *Pertama*, investor di pasar modal adalah mereka yang memanfaatkan pasar modal sebagai tempat untuk investasi di perusahaan-perusahaan yang diyakininya baik dan menguntungkan, bukan untuk tujuan mencari *capital gain* (keuntungan) melalui *short selling*. Mereka mendasarkan keputusan investasinya melalui informasi yang paling dipercayai tentang faktor-faktor fundamental ekonomi dan syarikat itu sendiri melalui kajian yang teliti. Sementara *speculator* bertujuan untuk mendapatkan keuntungan yang biasanya dilakukan dengan upaya permainan saham.

Kedua, spekulasi bukan merupakan investasi, meskipun di antara keduanya ada kemiripan (persamaan). Perbedaan yang sangat kentara di antara keduanya adalah terletak pada "spirit" yang menjiwainya, bukan pada bentuknya. Para *speculator* membeli sekuriti untuk mendapatkan keuntungan dengan menjualnya kembali secara (*short term*). Sedangkan para investor membeli sekuriti dengan tujuan untuk berpartisipasi secara langsung dalam bisnis (perdagangan) yang lazimnya bersifat *long term*.

Ketiga, spekulasi adalah kegiatan *game of chance*, sedangkan bisnis adalah *game of skill*. Seseorang dianggap melakukan kegiatan spekulatif apabila ia ditemui memiliki motif memanfaatkan ketidakpastian tersebut untuk keuntungan jangka pendek.⁶⁶ Dengan karakteristik tersebut, maka investor yang terlibat di pasar perdana dengan motivasi untuk mendapatkan *capital gain* semata-mata ketika saham dilepaskan di pasar sekunder, boleh masuk ke dalam golongan spekulasi. Oleh sebab itu, ajaran Islam secara tegas melarang tindakan spekulasi ini, sebab secara diametral bertentangan dengan nilai-nilai *illahiyyah* dan *insaniyyah*.⁶⁷

Kegiatan spekulatif dalam pasar modal muncul karena adanya harapan untuk memenuhi keperluan diri sendiri. Maksudnya, jika seseorang membeli saham tertentu dengan harapan nilai saham akan naik, maka tindakan ini akan mendorong kenaikan harga-harga saham tersebut. Keadaan ini akan mem-

66 Afzalur Rahman, *Economic Doctrines of Islam*, Vol. 3, (Lahore: Islamic Publication, 1974), hlm. 112.

67 Irfan Syaumi Beik, *Prinsip Pasar Modal Syariah*, <http://www.pesantrenvirtual.com/>.html, Akses 9 April 2008.

buat orang semakin ghairah untuk membeli semula dan hal ini menyebabkan kenaikan harga saham semula.⁶⁸ Masalahnya, bagaimana pasar modal Islam boleh menghilangkan praktik spekulasi ini. Spekulasi dilarang bukan karena ketidakpastian yang ada dihadapannya, melainkan tujuan (niat) dan cara orang mempergunakan ketidakpastian tersebut. Spekulasi juga meninggalkan *sense of responsibility* dan *rule of law* untuk memperoleh keuntungan semata daripada adanya ketidakpastian, itulah yang dilarang yaitu berkaitan dengan konsep *gharar* dan *maysir* dalam Islam. *Al-Gharar* dan *al-Maysir* sendiri adalah konsep yang sangat berkaitan dengan mudarat, *negative result*, atau bahaya (*hazard*).

Dalam pasar modal, larangan syariah di atas mesti diimplementasikan dalam bentuk aturan yang dapat mencegah praktik spekulasi, riba dan gharar. Salah satunya adalah dengan menetapkan minuman *holding period* atau jangka waktu memegang saham minuman. Dengan aturan ini, saham tidak boleh diperjualkan setiap saat, sehingga menahan motivasi mencari keuntungan daripada pergerakan harga saham semata. Tapi masalahnya kemudian timbul lagi, yaitu berapa lama minuman *holding period* (jangka waktu menahan pelaburan) yang munasabah. Pembatasan waktu itu memang dapat menahan spekulasi, akan tetapi juga akan membuat pelaburan di pasar modal menjadi tidak liquid. Padahal tidak mungkin seorang pelabur yang rasional betul-betul memerlukan likuiditas yang mendadak sehingga harus mencairkan saham yang dipegangnya, sedangkan dia terhalang karena belum tiba masa minimum holding periodnya.

Seandainya seluruh perdagangan saham syariah, sama ada di pasar primer maupun di pasar sekunder dilakukan atas dasar investasi, maka kelajuan perdagangan dan nilai kapitalisasi saham yang diperdagangkan akan sangat jauh berbeda dengan apa yang terjadi di pasar modal konvensional selama ini. Dengan landasan inilah, maka dalam kacamata ekonomi sekarang pasar modal yang seperti itu tidak akan menarik minat orang ramai. Hal ini karena perdagangan saham terjadi dengan sangat lambat. Para investor yang ingin masuk dalam suatu perseroan (perusahaan) harus menunggu suatu Perseroan Terbatas yang diminatinya menjual sahamnya di pasar perdana. Kemudian di pasar sekunder para investor harus menunggu dalam waktu panjang bagi pihak pemegang saham suatu perseroan terbatas (syarikat berhad) melepaskan sahamnya di papan bursa. Permasalahan muncul lagi dari emiten yang sahamnya diperdagangkan di pasar modal Islam. meskipun pengelolah pasar modal Islam sudah member-

68 Abd Razzaq 'Afifi, *Burshah al-Awraq al-Maliyyah wa al-Dharaib*, Cet. I, (Riyadh: Dar al-Shami'i, 2001), hlm. 188

sihkan emiten mana saja yang berhak masuk dalam pasar modal Islam melalui pemilihan ketat. Akan tetapi ada satu yang terlepas dari proses pemilihan tersebut, yakni pembatasan suatu emiten tidak boleh terlibat dalam perdagangan dan hutang piutang ribawi dalam batas-batas maksimal tertentu yang pada saat perdagangan tingkat (*nisbah*) hutang perusahaan kepada institusi kewangan ribawai lebih dominan daripada modalnya. Dalam pasar modal Islam biasanya batasan asset yang mengandung unsur riba adalah 30 peratus daripada total asset emiten.

Dalam reksa dana (*mutual fund*) syariah suatu emiten tidak layak diinvestasikan oleh reksa dana syariah apabila suatu emiten memiliki nisbah hutang terhadap modal lebih dari 82 persen.⁶⁹ Muncul pertanyaan apakah terjamin aset suatu emiten yang mengandung unsur riba tidak lebih daripada 30 peratus? Di sini masalahnya bukan pada berapa persen unsur ribawi, sebab sedikit ataupun banyak yang namanya riba tetap haram. Dengan demikian saham yang diterbitkan dan diperdagangkan daripada suatu emiten yang melibatkan unsur ribawi menjadi haram. Ini disebabkan percampuran antara modal yang halal dengan modal yang haram sehingga tidak dapat dipilih lagi mana modal murni dan mana faedahnya.⁷⁰

Dengan demikian dapat dilihat bahwa masalah pasar modal adalah model perdagangan yang baru yang secara spesifik tidak dapat merujuk kepada pendapat imam mazhab fiqh. Meskipun secara susunan bahasa menghuraikan pendapat ulama pengikut mazhab Hanbali, akan tetapi ijtihad imam mazhab fiqh mengenai batasan dan pedoman umum tentang muamalah dapat dijadikan 'pisau' analisis untuk menilai dan menetapkan hukum muamalah yang terjadi di tengah-tengah masyarakat akibat dari perkembangan kemajuan hidup umat manusia.

Dalam Fatwa tentang pasar modal ini, DSN-MUI mendasarkan kepada ijtihad dan ketetapan hukum pasar modal kepada dalil dan kaedah umum yang menjadi prinsip bermuamalah dalam Islam. sehingga corak ijtihad dalam metode atau kaedah penyelidikan ini, mencerminkan pendapat mayoritas mazhab fiqh tanpa berpihak dan cenderung kepada salah satu mazhab fiqh tertentu. Corak ijtihad yang digunakan dalam penetapan keputusan ini adalah semata-mata ijtihad atau pandangan dari perspektif ahli hukum Islam kontemporer yang

69 Keputusan DSN-MUI No: 20/DSN-MUI/IV/2001 tentang Pedoman Pelaksanaan Pelaburan untuk Reksa dana Syariah, Pasal 10 poin (b).

70 Taqi al-Din al-Nabhani, *Op.Cit.*, hlm. 18.

mendasarkan kepada kaedah umum tentang *mu'amalah maliyyah* dalam ajaran Islam.

Berkaitan dengan metode yang digunakan dalam penetapan Fatwa ini, DSN-MUI menggunakan kaedah umum dalam al-Qur'an dan al-Hadis yang telah dirumuskan oleh para ulama mazhab fiqh. Ada beberapa kaedah umum tentang prinsip syariah tentang *mu'amalah maliyyah*, di antaranya adalah: praktik *mu'amalah maliyyah* adalah bebas dari unsur *darar*, *gharar*, *riba*, *maysir*, *rishwah*, maksiat dan kezaliman. Karana pada dasarnya praktik muamalah adalah harus kecuali ada sesuatu yang menyebabkan praktik muamalah diharamkan. Adapun penyebab muamalah diharamkan adalah ketika praktik atau pelaksanaannya mengandung salah satu daripada tiga domain, yaitu *riba*, *gharar* (tipu daya) dan *maysir* (judi).

Sebenarnya, ijtihad kolektif dalam Fatwa DSN-MUI tentang pasar modal Islam ini kurang meluas dalam melihat masalah itu. Ini disebabkan oleh pemahaman terhadap masalah (*tasawwur al-masalah*) dalam Fatwa tentang masalah pasar modal adalah kurang mendalam. Fatwa DSN-MUI hanya melihat pasar modal dari sudut barang yang diperdagangkan dan proses perdagangan antara pihak penjual dan pembeli yang harus sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Padahal dalam masalah pasar modal perlu juga diperhatikan dan diteliti perseroannya. Ini dikarenakan, perseroan (perusahaan) adalah bentuk kerjasama (*musharakah*) antara dua orang atau lebih, perlu mengikuti prinsip syariah, termasuk keharusan adanya akad, ijab dan qabul (kesepakatan untuk kerjasama) dalam memproduksi harta.

Dalam fatwa ini juga, tidak diberikan ketegasan mengenai prinsip *musharakah* yang harus dipenuhi dalam perdagangan pasar modal Islam. Sehingga unsur-unsur *musharakah* yang harus dipenuhi dalam perdagangan ini tidak termaktub dalam keputusan. Bahkan, tidak adanya penekanan mengenai ketentuan bersyarikat dalam fatwa ini memungkinkan lebih banyak muncul spekulasi untuk mengambil untung. Oleh sebab itu, ketentuan ijab dan qabul dalam bekerjasama pada perdagangan pasar modal akan memunculkan motivasi investasi daripada motivasi spekulasi.

Ketidaktelitian Fatwa DSN-MUI ini juga dapat dilihat dalam menentukan angka emiten (*emiten/syarikat*) yang berdagang dan berhutang piutang dengan institusi keuangan ribawi yang tidak lebih dominan daripada modalnya. Ketentuan ini menyebabkan bercampurnya modal syariah dengan modal ribawi yang sukar untuk dilakukan pemisahan dan pengawasannya. Dalam konteks pasar

modal Islam, yang idealnya adalah pasar modal Islam itu tidak mengandung perdagangan ribawi, perdagangan yang mengandung tipu daya (*gharar*), dan saham perusahaan yang bergerak pada bidang yang diharamkan.

Corak *ijtihad* dan metode penetapan hukum pasar modal Islam ini merupakan kreativitas ulama kontemporer yang merespon dan memberi maklumat balas terhadap perkembangan muamalah berdasarkan dalil umum syariah dan hasil usaha para ulama *salaf*. Metode ini dipilih karena masalah dalam pasar modal adalah suatu masalah hukum uang baru yang tidak dapat dirujuk secara langsung pada dalil syarak dan pendapat imam mazhab. Oleh sebab itu, Fatwa ini selain merujuk pada dalil umum tentang muamalah juga merujuk pada keputusan organisasi internasional yang kemudian disesuaikan dengan konteks *fiqh* masyarakat Indonesia yang terbit dalam wadah Majlis Ulama Indonesia.

Penutup

Dengan demikian dapat disimpulkan, bahwa penetapan Fatwa DSN-MUI tentang pedoman umum penerapan prinsip syariah di pasar modal Islam dilihat dari metodologi pengambilan hukum didapati menggunakan gabungan tiga metode, *bayani*, *qiyas* dan *taqriri*. Metode bayani juga diuraikan melalui penjelasan mujmal terhadap lafaz riba yang terdapat dalam al-Qur'an. Lafaz riba memerlukan penelitian kepada makna yang dikehendaki, yaitu apa yang dimaksudkan riba, adakah termasuk dalam kategori *riba naqih* atau *riba nasiah*. Setelah melalui penelitian dan pengkajian terhadap al-Qur'an dan hadith Nabi Saw, maka DSN-MUI menetapkan riba dalam al-Qur'an adalah *riba nasiah*. Kemudian riba menjadi *asl* dan hukum *asl* dalam menganalogikan hukum faedah (keutungan).

Metode qiyasi dilakukan dalam usaha untuk mewujudkan penyesuaian antara bunga bank dengan praktek riba pada zaman rasulullah Saw. Maksudnya, yang menjadi hukum asal adalah riba, *far'*-nya adalah faedah dan *'illat* hukumnya adalah tambahan pembayaran yang terjadi karena penangguhan waktu pembayaran tanpa upah yang dijanjikan (eksploitasi oleh pihak yang kuat terhadap pihak yang lemah). Hukum asal riba adalah haram, maka kesimpulan (*natijah*) hukum *far'*-nya (faedah bank) adalah haram. Bahkan MUI menggunakan metode qiyas *awlawi* dengan menyebutkan bahwa bunga uang atas pinjaman yang diamalkan sekarang adalah lebih buruk daripada riba diharamkan oleh Allah Swt dalam al-Qur'an. Hal ini dikarekan, tambahan dalam riba hanya dikenakan pada saat peminjam (yang berhutang) tidak mampu menyelesaikan

pinjaman pada saat jatuh tempoh, sedangkan dalam sistem bunga tambahan sudah langsung dikenakan sejak terjadi perdagangan. Metode taqriri dilakukan dengan mengambil ketetapan hukum yang disepakati selama terdapat pendapat ulama yang menonjol.

Sedangkan corak ijtihad keputusan ini di samping merujuk kepada pendapat di kalangan ulama Hanabilah juga lebih menekankan kepada pendapat ulama yang terbabit secara langsung dengan permasalahan masa kini yang sukar diidentifikasi aliran mazhab fiqhnya. Artinya, permasalahan yang baru muncul dalam masalah muamalah tidak harus terikat dengan mazhab fiqh tertentu tetapi cukup dengan mengambil nilai-nilai Islam dalam berdagang untuk menjawab masalah hukum kekinian.

Bibliografi

- Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Semarang: C.V. Toha Putra, 1989.
- Ahmad Shalabi, *Tarikh al-Tashri' al-Islami*, Cet. Ke-2, Al-Qaherah: Maktabah al-Nahdah al-'Al-Misriyyah, 1981.
- Abu Abdillah bin Ibrahim Ibnu Al-Mughirah bin Baldazabah Al-Bukhari, *Shahih Bukhari*, Juz. 3, Bairut: Dar al Fikr, t.t.
- Abu Bakr ibn Mas'ud Al-Kasani, *Bada'i al-Sana'i fi Tartib al-Shara'i*, Cet. Ke-2, Juz 6, Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1986.
- 'Abd al-Karim al-Khatib, *al-Siyasat al-Maliyyah fi al-Islam wa Sillatuha bi al-Mu'amalat al-Mu'asirah*, Kairo: Dar al-Fikr al-'Arabi, 1976.
- Ahmad ibn Hamzah ibn Shihab al-Din al-Ramli, *Nihayat al-Muhtaj ila Sharh al-Minhaj*, Juz 3, Misr: Maktabah Mustafa al-Babi al-Halabi, t.t.
- Abdullah al-Mushlih dan Shalah Ash-Shawi, *Bunga Bank Haram: Menyikapi Fatwa MUI Menuntaskan Keragaman Umat*, Jakarta: Darul Haq, 2001.
- Ahmad Hidayat Buang, "Investment in Stock Exchange and Islamic Law", *Jurnal Syariah*, No. 2, Vol. 7, Desember 2007.
- Al-Hafiz Ibn Hajar Ahmad ibn 'Ali al-'Asqalani, *Fath al-Bari bi Sharh Sahih al-Bukhari*, Juz 4, Diedit Oleh 'Abd al-'Aziz ibn 'Abd Allah ibn Baz, Beirut: Dar al-Fikr, 1996.
- Ali Ahmad al-Salus, *Ma'wusu'ah al-Qadaya al-Fiqhiyyah al-Mu'asirah wa al-Iqtisad al-Islami*, Qatar: Dar al-Thaqafah, 2006.
- Afzalur Rahman, *Economic Doctrines of Islam*, Vol. 3, Lahore: Islamic Publication, 1974.
- Abd Razzaq 'Afifi, *Burshah al-Awraq al-Maliyyah wa al-Dharaib*, Cet. I, Riyadh: Dar al-Shami'i, 2001.

- DSN dan BI, *Himpunan Fatwa DSN*, Jakarta: DSN dan BI, 2003.
- Hasanudin, "Produk dan Transformasi Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI", dalam *Jurnal Al-Risalah*, Vol. 8, No.2, Desember 2008.
- Ibnu Qudamah, *Al-Mughni*, Jilid 5, Beirut: Dar al-Fikr, t.t.
- Imran Ahsan Khan Nyazee, *Islamic Law of Bussiness Organization Partnerships*, Kuala Lumpur: The Other Press Sdn Bhd, 2006.
- Inggi H. Achsien, *Pelaburan Syariah di Pasar Modal*, Jakarta: Gramedia, 2000.
- Ibn Rushd, *Bidayat al-Mujtahid wa Nihayat al-Muqtasid*, Juz 2, Beirut: Dar al-Fikr, 1995.
- Ibn Qudamah, *al-Mughni wa Sharh al-Kabir*, Juz 4, Beirut: Dar al-Kitab al-'Arabi, 1972.
- Ibn Qayyim, *'Aun al-Ma'bud Sharh Sunan Abi Dawud*, Juz 9, Beirut: Dar al-Fikr, t.t.
- Ibn Qayyim, *I'lam al-Muwaqqi'in 'an Rabb al-'Alamin*, Juz 2, Beirut: Dar al-Fikr, 1977.
- Jalal al-Din 'Abd al-Rahman al-Suyuti, *al-Ashbah wa al-Naza'ir fi Qawa'id wa Furu' Fiqh al-Shafi'i*, Beirut: Dar al-Kitab al-'Ilmiyyah, 1983.
- Kamus Dwibahasa*, Cet. Ke-6, Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka, 1990.
- Kamus Ekonomi*, Cet. Ke-1, Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka, 1991.
- Kamus Kewangan*, Cet. Ke-1, Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka, 1996.
- Lokakarya dan pertemuan ulama dengan tema "Bunga Bank dan Pengembangan Ekonomi Rakyat" bertempat di Bogor pada tanggal 19-22 Agustus 1990.
- Muhammad 'Abd Razzaq Manna, *ad-Dalail: English-Arabic Dictionary*, Cet. Ke-2, Al-Qaherah: Maktabah al-Mutanabbi, 1984.
- Muhammad al-Khudari, *Tarikh al-Tashri' al-Islami*, Cet. Ke-2, Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1994.
- Muhammad Yusuf Musa, *al-Fiqh al-Islami: Madkhal li Dirasah Nizam al-*
- Muhammad Ibn 'Umar al-Quraysh al-Razi, *al-Tafsir al-Kabir*, Jilid 1, Kaherah: Matba'ah al-Baha'iyyah al-Misriyyah, 1938.
- Muhammad 'Abd al-Ghaffar al-Sharif, *Buhuts Fiqhiyyah Mu'ashirah*, Beirut: Dar Ibn Hazm, 1999.
- Muhammad Yusuf Musa, *al-Islam wa Musykilatuna al-Hadhirah*, t.tp: Silsilah al-Tsaqafah al-Islamiyah, 1958.
- Muhammad Rawas Qal'ahji, *al-Mu'amalat al-Maliyah al-Mu'ashirah fi Dhaw'i al-Fiqh wa al-Syari'ah*, Beirut: Dar al-Nafa'is, 1999.
- MoU DSN-MUI dengan Bapepam Tanggal 14 Maret 2003.
- MoU DSN dengan SRO Tanggal 10 Juli 2003 tentang Kerjasama Pengembangan dan Implementasi Prinsip Syariah di Pasar Modal Indonesia.
- Muhammad ibn Mukarram ibn Manzur, *Lisan al-'Arab*, Juz 5, Bairut: Dar al-Fikr,

- 1968.
- Muhammad Abu Bakr al-Razi, *Mukhtar al-Sihah*, Cet. Ke-1, Edisi Baru, Beirut: al-Maktabah al-'Asriyyah, 1995.
- Muhammad ibn Mukarram Ibn Manzur, *Lisan al-'Arab*, Baerut: Dar al-Fikr, 1968.
- M. Hashim Kamali, "Islamic Commercial Law: an Analysis of Futures", *American Journal of Islamic Social Sciences* (13:2), Virginia: International Institute of Islamic Thought, 1996.
- Nur Ahmad Fadhil Lubis, "Financial Activitism Among Indonesian Muslims", dalam Virginia Hooker & Amin Saikal et al, *Islamic Perspectives on The New Millenium*, Singapore: ISEAS Publication, 2004.
- Qarar Majma' al-Fiqh al-Islami VII di Jeddah 7-12/11/1412 bertepatan dengan 9-10/5/1992.
- Samir 'Abd al-Hamid Radwan, *Aswaq al-Awraq al-Maliyyah*, Kairo: International Institute of Islamic Thought, 1996.
- Taqi al-Din al-Nabhani, *al-Nizam al-Iqtisadi fi al-Islam*, Cet. VI, Beirut: Dar al-Ummah, 2004.
- 'Umar bin 'Abdul 'Aziz al-Matrak, *al-Riba wa al-Mu'amalat al-Mashrafiyyah*, Riyadh: Dar al-'Ashimah, 1417H.
- Wahbah al-Zuhayli, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, Juz 1, Cet. Ke-2, Beirut: Dar al-Fikr, 2001.
- Workshop Pasar Modal Islam di Jakarta pada 14-15 Maret 2003M/ 11-12 Muharram 1424H.
- Yahya ibn Sharf al-Nawawi, *Sahih Muslim bi Syarh al-Nawawi*, Cet. Ke-2, Juz 11, Beirut: Dar al-Khayr, 1996.
- Yusuf al-Qardawi, *Bay' al-Murabahah li al-Amir bi al-Shira*, Abidin: Maktabah Wahbah, 1987.
- Yusuf Ahmad Mahmud al-Sabatin, *al-Buyu' al-Qadimah wa al-Mu'asirah wa al-Bursat al-Mahalliyyah wa al-Dauliyyah*, Beirut: Dar al-Bayariq, 2002.
- Zainuddin Jafar, "Bay' al-Ma'dum: an Analysis", *Kertas Kerja International Conference of Islamic Capital Market '97*, Kuala Lumpur: Suruhanjaya Sekuriti, 1997.

Peraturan-peraturan

- Undang-undang RI No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal.
- Artikel 197-201, *Majallat al-Ahkam al-'Adliyyah*, Tahun 1964; Vide Artikel 197-201, *The Civil Law of Palestine and Trans-Jordan*.
- Keputusan DSN-MUI No: 20/DSN-MUI/IV/2001 tentang Pedoman Pelaksan-

aan Pelaburan untuk Reksa Dana Syariah, Pasal 10 poin (b).
Keputusan Mukhtamar Ke-7 Majma' Fiqh Islami Tahun 1992 di Jeddah.
Keputusan Rekomendasi Lokakarya 'Alim 'Ulama tentang Reksa Dana Syariah
(*Islamic Mutual Fund*) pada 24-25 Rabi'ul Awal 1417H/ 29-30 Juli 1997.
Keputusan Mesyuarat Pleno DSN-MUI pada hari Sabtu 08 Sya'ban 1424H/04
Oktober 2003M.
SK DSN-MUI No. 01 Tahun 2001 tentang Pedoman Dasar DSN.

Website

Iwan Pontjowinoto, "Prinsip-prinsip Syariah di Pasar Modal", www.dilibrary.net/html.
Irfan Syauqi Beik, *Prinsip Pasar Modal Syariah*, <http://www.pesantrenvirtual.com/html>.

PEDOMAN PENULISAN

BENTUK NASKAH

Jurnal Al-Risalah menerima naskah/tulisan, baik dalam bentuk artikel hasil penelitian (*research papers*), artikel ulasan (*review*), dan resensi buku (*book review*), baik dalam Bahasa Indonesia, Bahasa Arab atau Bahasa Inggris

CARA PENGIRIMAN NASKAH

Tulisan dialamatkan kepada Redaksi Jurnal Al-Risalah Fakultas Syariah IAIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, Jl. Jambi-Muara Bulian KM. 16 Simp. Sungai Duren, Muaro Jambi-Jambi, Telp. (0741) 582021, email: jurnal.alrisalah@gmail.com. Penulis harus menyerahkan 2 (dua) eksamplar naskah/tulisan dalam bentuk hard copy (*print out*) dan soft copy dalam CD/flash disk, atau melalui email ke redaksi jurnal Al-Risalah.

FORMAT NASKAH

Al-Risalah adalah jurnal ilmiah yang terbit dua kali setahun. Al-Risalah siap menerima sumbangan tulisan dari para penulis, dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Tulisan belum pernah diterbitkan/dipublikasikan di dalam buku atau majalah lainnya. Topik tulisan sesuai dengan lingkup kajian jurnal, yakni kajian ilmu syariah dan ilmu hukum.
2. Jumlah halaman antara 20-25 halaman, ukuran kertas A4 spasi ganda. (Margin kiri 4, atas 4, kanan 3, dan bawah 3).
3. Tulisan yang masuk dilengkapi biodata penulis, meliputi: nama, asal perguruan tinggi/instansi, dan kualifikasi keilmuan penulis.
4. Tulisan yang telah diserahkan menjadi hak redaksi, dan redaksi berhak merubah tulisan tanpa mengurangi makna tulisan.

SISTEMATIKA NASKAH

Judul Naskah

Judul ditulis dengan huruf kapital diletakkan di tengah margin. Judul tulisan diikuti pula dengan abstrak dalam Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris antara 50-100 kata dan kata kunci (*keywords*) sebanyak 2-5 kata. Abstrak ditulis satu spasi dan ditulis dalam satu paragraf.

Pendahuluan

Dalam pendahuluan harus berisikan latar belakang masalah yang diangkat, beserta rumusan masalah. Jika perlu, dapat dimuat secara ringkas metode penelitian yang digunakan.

Pembahasan dan Hasil Penelitian

Berisikan pembahasan terhadap permasalahan yang dikaji dalam naskah, analisis, serta penjelasan tentang hasil penemuan selama penelitian. Namun, tidak perlu dicantumkan kalimat “PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN”.

Penutup

Berisikan kesimpulan, ditambah saran-saran jika diperlukan.

SUMBER KUTIPAN

Kutipan menggunakan cara *Ibid*, *Op. Cit*, dan *Loc. Cit*. Semua tulisan menggunakan referensi model *footnote*, dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Ayat al-Qur'an, contoh: An-Nisaa' (4): 42.
2. Buku, contoh: Muhammad Hasbi, *Nalar Fiqih Kontemporer*, cet. ke-2, (Jambi: Syariah Press, 2008), hlm. 8.
3. Apabila penyusun/penulis lebih dari dua orang, cukup nama penyusun pertama saja yang ditulis dan nama-nama lain diganti “dkk” (dan kawan-kawan), contoh: Hasan Ibrahim Hasan, dkk., *an-Nuzum al-Islamiyyah*, edisi ke-1, (Kairo: Lajnah at-Ta'lif wa at-Tarjamah wa an-Nasyr, 1953), hlm. 54.
4. Penyusun/penulis bertindak sebagai editor atau penghimpun tulisan, contoh: M. Nazori Madjid (ed.), *Agama & Budaya Lokal: Revitalisasi Adat & Budaya*

- di Bumi Langkah Serentak Limbai Seayun*, (Jambi: Sulthan Thaha Press, 2009), hlm. 42.
5. Penyusun/penulis sebagai suatu perhimpunan, lembaga, panitia atau tim, contoh: Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Syariah*, (Jambi: Syariah Press, 2010), hlm.1.
 6. Nama penulis tidak ada, contoh: *Panduan Amaliyah Ramadhan*, (Jambi: Sulthan Thaha Press, 2009), hlm. 9.
 7. Buku terjemahan, contoh: Ahmad Haris, *Islam Inovatif: Eksposisi Bid'ah dalam Teori dan Praktek*, alih bahasa Bahrul Ulum dan Mohamad Rapik, (Jambi: Sulthan Thaha Press, 2007), hlm. 51.
 8. Buku saduran, contoh: Vollmar, *Hukum Benda*, disadur oleh Chidir Ali, (Bandung: Tarsito, 1978), hlm. 234.
 9. Kamus, contoh: *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, W. J. S. Poerwadarminta, (Jakarta: Balai Pustaka, 1987), hlm. 12.
 10. Artikel dalam jurnal, majalah atau surat kabar, contoh: H. Tjaswadi, "Sekali Lagi tentang Amandemen UUD 1945," *Kedaulatan Rakyat*, No. 227, Th. LVII (Selasa, 21 Mei 2002), h1m. 8.
 11. Artikel dalam media massa, contoh: M. Luqman Hakiem, "Tasawuf dan Proses Demokratisasi", *KOMPAS*, 30 Maret 2001, hlm. 4.
 12. Artikel dalam buku atau ensiklopedi, contoh: Syamsul Anwar, "Teori Konformitas dalam Metode Penemuan Hukum Islam al-Gazali," dalam M. Amin Abdullah, dkk., (ed.), *Antologi Studi Islam: Teori dan Metodologi*, (Yogyakarta: Sunan Kalijaga Press, 2000), h1m. 275.
 13. Hasil penelitian yang tidak diterbitkan, contoh: Illy Yanti dan Rafidah, "Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam UU NO.3/2006 (KHI) dan Implementasinya dalam Sistem Ekonomi Nasional", Hasil Penelitian Kompetitif IAIN STS Jambi, (2009), hlm. 10.
 14. Makalah tidak diterbitkan, contoh: Rahmadi, "Kaedah-Kaedah Falakiyah", Makalah Disampaikan pada Lokakarya Hisab Rukyat, Diselenggarakan oleh Kanwil Depag Provinsi Jambi, Jambi, 26 Desember 2009, hlm. 5.
 15. Sumber yang masih berbentuk manuskrip, contoh: *Undang-Undang Palembang*, Berg Col. No. 146, Perpustakaan Universitas Leiden, Vol. No.3.
 16. Dokumen berbentuk surat-menyurat, contoh: *Staatsblaad van Nederlandsch Indie*, 1937, No. 116.
 17. Dokumen dalam bentuk arsip-arsip perkantoran lainnya, contoh: Pengadilan Agama Kota Jambi, *Daftar Jumlah Kasus Perceraian 2011*, 22 April 2012.

18. Peraturan perundang-undang atau peraturan lainnya belum disebutkan dalam tulisan, contoh: Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 2 ayat (1).
19. Nomor dan nama peraturan perundang-undang atau peraturan lainnya sudah disebutkan dalam tulisan, contoh: Pasal 2 ayat (1).
20. Pidato, contoh: Pidato Menteri Agama, Disampaikan dalam Acara Briefing Dengan Jajaran Kanwil Depag Provinsi Jambi dan IAIN, Tanggal 1 Februari 1988.
21. Wawancara, contoh: Wawancara Dengan Abdullah, Ketua RT. 03 Kel. Simpang IV Sipin Kec. Telanaipura-Jambi, 5 Maret 2009.
22. Website tanpa penulis, contoh: "Remarks before the American Muslim Council," <http://usinfo.state.gov/usa/islam/s050799.htm>, akses 7 Mei 2009.
23. Website dengan pencantuman penulis, contoh: Noam Chomsky, "Market Democracy in a Neoliberal Order: Doctrines and Reality," <http://www.zmag.org/chomsky/index.cfm>, akses 10 Januari 2003.

CONTOH PENULISAN BIBLIOGRAFI

- Akh. Minhaji, *Strategies for Social Research: The Methodological Imagination in Islamic Studies*, Yogyakarta: Sunan Kalijaga Press, 2009.
- Andi Rustam, Ahmad Bakaruddin R. dan Syaiful, "Voting Behavior Pemilih Pertama pada Pemilu 2004 di Kota Padang" dalam Ahmad Bakaruddin R, dkk., (ed), *Teori dan Metode Penelitian Ilmu Politik*, Padang: Laboratorium Ilmu Politik Unand, t.t.
- Anik Ghufron, *Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif*, Makalah Dipresentasikan pada Kuliah Metodologi Penelitian di Program Doktor UIN Yogyakarta di Jambi, tanggal 25-26 Januari 2010.
- Djawahir Hejzিয়েy, *Pedoman Penelitian Skripsi*, Jakarta: ttp, 2007.
- John M. Echols dan Hasan Shadily, *Kamus Inggris-Indonesia*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1993.
- Program Pascasarjana UIN Yogyakarta, *Buku Pedoman Penuisan Disertasi*, Cet. 2, Yogyakarta: Program Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2008.
- Sayuti, "Relevansi antara *Maal Administratif* dan Upaya Penciptaan *Good Governance*", *Jurnal Ilmiah Al-Risalah*, Fakultas Syariah IAIN STS Jambi, Volume 12, Nomor 1, Juni 2012.

Pedoman Penulisan

Tim Penulis Fakultas Syariah dan Hukum, *Buku Pedoman Penulisan Skripsi*, Jakarta: Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2007.